

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) saat ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah negara berkembang sebagai salah satu kebijakan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Hariyadi et al., 2024). Secara tradisional, pengembangan pariwisata seringkali dilakukan secara *top-down*, di mana pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dikuasai oleh pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan swasta. Pendekatan ini sering mengabaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal serta menimbulkan dampak negatif sosial, budaya, dan lingkungan, seperti penggusuran masyarakat, hilangnya tradisi, dan eksplorasi sumber daya alam (Choi & Sirakaya, 2006).

Menanggapi permasalahan itu, Murphy (1985) memperkenalkan gagasan CBT, yang berfokus pada partisipasi langsung masyarakat setempat dalam proses perencanaan serta pengelolaan kegiatan pariwisata.. Pendekatan ini dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan komunitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta aspek sosial dan budaya. Meski demikian, peran masyarakat lokal sering kali kurang diperhatikan atau hanya dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Padahal, CBT seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Gascón, 2013). Kesadaran akan peran aktif masyarakat dalam keberhasilan dan keberlanjutan CBT semakin meningkat, di mana masyarakat kini berperan sebagai pelaku utama yang terlibat langsung dan mendapatkan manfaat bersama dengan pelaku pariwisata serta pihak terkait

lainnya. Hal ini menjadi sangat penting karena pariwisata memiliki peran vital bagi suatu negara karena dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemasukan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan, serta menjaga kelestarian budaya local (Syahari et al., 2023).

Di Indonesia, peran pariwisata sangat besar dalam menunjang perekonomian, baik di skala nasional maupun daerah. Sebagai sektor yang berkembang pesat, pariwisata mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperbaiki taraf hidup masyarakat, dan menggerakkan sektor-sektor produktif lainnya. Pengembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi strategi dalam memajukan perekonomian daerah (Arum et al., 2022).

Tabel 1.1 Data Devisa Sektor Pariwisata di Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Devisa Pariwisata (Miliar US \$)
2019	16,91
2020	3,31
2021	0,54
2022	7,03
2023	7,22

Sumber : Kemenparekraf, 2024 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2019 sektor pariwisata Indonesia mampu menghasilkan devisa sebesar US\$16,91 miliar. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan hingga mencapai US\$13,53 miliar,

sehingga devisa yang diperoleh hanya tersisa US\$3,38 miliar. Tren penurunan ini berlanjut di tahun 2021, dengan devisa yang menurun lebih jauh menjadi US\$0,52 miliar. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, seperti percepatan program vaksinasi, pembukaan kembali akses masuk, dan pelonggaran aturan perjalanan, sektor pariwisata mulai bangkit kembali dan berhasil menghasilkan devisa sebesar US\$6,78 miliar pada tahun 2022, meningkat 40,10% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2023, pemulihan sektor ini terus berlanjut, dengan perolehan devisa mencapai US\$14 miliar. Hal ini menjadikan tahun 2023 sebagai periode dengan pertumbuhan terbaik pascapandemi, dengan kenaikan devisa sebesar US\$7,22 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Arah pembangunan pariwisata saat ini lebih difokuskan pada aspek keberlanjutan, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara bijak demi kepentingan jangka panjang (Sharpley, 2000). Salah satu prinsip utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ilmu administrasi publik, pariwisata menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Rulinawaty et al., 2024). Ruang lingkup administrasi publik dalam pariwisata mencakup pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan, pemberian pelatihan, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil (Hajar & Yuliani, 2024). Pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pelestarian warisan budaya, dan pemeliharaan lingkungan dengan perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang efektif. Paradigma baru pengelolaan pariwisata

yang berfokus pada keberlanjutan, teknologi, dan partisipasi komunitas mendorong terciptanya model governance yang kolaboratif, di mana komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan (Hajar & Yuliani, 2024). Partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola publik, terlebih dalam sistem pemerintahan demokrasi seperti di Indonesia, setiap individu dalam suatu negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan (Jayanti, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program merupakan kunci agar pembangunan pariwisata benar-benar menjawab kebutuhan, memecahkan permasalahan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat

Saat ini, wisata alternatif yang berbasis pada alam dan partisipasi masyarakat lokal, seperti ekowisata, agrowisata, dan wisata petualangan, semakin menarik minat wisatawan (Arum et al., 2022). Model wisata semacam ini memberikan keleluasaan bagi wisatawan dalam memilih destinasi dan menikmati pengalaman yang berbeda. Keinginan untuk menghindari suasana wisata massal yang padat dan bising mendorong wisatawan beralih ke pilihan yang lebih tenang, seperti lingkungan pedesaan. Pariwisata alternatif memberi kesempatan bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk bertemu dan saling berbagi pengalaman secara positif dan saling menguntungkan (Satriawati et al., 2023). Pandangan ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pariwisata alternatif, yaitu fokus pada nilai-nilai alam, penekanan pada aspek budaya dan sosial, serta adanya manfaat

finansial yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Sejalan dengan inisiatif desa wisata yang digagas pemerintah, tren tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi masyarakat local. Pengembangan terhadap wisata di kawasan pedesaan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan menjaga kelestarian lingkungan seperti persawahan, bentang alam, danau, dan sungai yang berperan dalam upaya mengurangi pemanasan global. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dengan berfokus pada potensi desa diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus berperan dalam menahan arus urbanisasi ke kota.

Pembangunan desa wisata diposisikan sebagai salah satu elemen strategis dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Dalam konteks tersebut, desa wisata dianggap sebagai sarana penting untuk mempercepat kemajuan desa secara komprehensif, dengan penekanan pada pengembangan sosial, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan signifikan di tingkat desa, baik dari segi sosial maupun ekonomi, sehingga desa tersebut dapat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1.2 Jumlah Desa Wisata Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Desa Wisata
2021	1.831
2022	3.419
2023	4.573
2024	6.026

Sumber : Kemenparekraf (diolah)

Dari tabel diatas Kemenparekraf menyampaikan bahwa jumlah jumlah desa wisata menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari 1.831 desa pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.419 desa pada 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 4.573 desa pada 2023. Dalam tahap pengembangannya, desa wisata dikelompokkan ke dalam empat tingkatan, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Desa yang masuk kategori rintisan adalah desa yang memiliki potensi pariwisata, tetapi belum mulai dikembangkan. Selanjutnya, kategori berkembang ditujukan untuk desa wisata yang potensi pariwisatanya telah dilakukan pengembangan dan mulai muncul kegiatan ekonomi. Kategori maju berlaku untuk desa wisata yang telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta Menggerakkan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih maju. Sedangkan desa yang tergolong mandiri merupakan desa wisata yang sudah memiliki kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan potensi wisatanya secara mandiri, termasuk dalam hal pemasaran digital produk-produk unggulannya.

Berdasarkan data terbaru Jejaring Desa Wisata (Jadesta) hingga 21 Oktober 2024, jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 6.026, tersebar di seluruh provinsi. Dari total tersebut, mayoritas berstatus desa wisata rintisan sebanyak 4.687 desa, disusul oleh 992 desa yang berada pada tahap berkembang, 314 desa berstatus maju, dan 33 desa telah mencapai tingkat kemandirian. Di antara sepuluh provinsi dengan konsentrasi desa wisata tertinggi, Jawa Timur menempati posisi teratas dengan 603 desa wisata. Rincinya menunjukkan 461 desa dalam kategori rintisan, 77 desa berkembang, 60 desa maju, serta 5 desa yang telah mencapai status mandiri. Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik. Berbagai jenis destinasi, seperti wisata alam, situs sejarah, serta atraksi budaya, telah dirancang dan dikembangkan sehingga menjadi destinasi wisata yang mampu memikat pengunjung, baik wisatawan lokal maupun internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif mendorong pemanfaatan potensi alam melalui pemberdayaan dan pengembangan desa wisata. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Pemberdayaan Desa Wisata, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan desa wisata di seluruh wilayah. Sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut, program pemberdayaan desa wisata akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hingga tahun 2024, Jawa Timur memiliki 603 desa wisata, dengan salah satu potensi terbesar terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki konsentrasi desa wisata yang tinggi dan merupakan bagian kawasan Gerbang

Kertasusila yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi (Ardianti & Eprilianto, 2022). Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengembangkan potensi pariwisata untuk menciptakan destinasi yang kompetitif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan total wilayah 969.360 km² yang terbagi atas 299 desa dan 18 kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2018–2033. Dari total 299 desa di Mojokerto, konsep desa wisata baru diterapkan di 10 desa, salah satunya adalah Desa Ketapanrame yang memiliki berbagai potensi unggulan. Pengembangan pariwisata di Desa Ketapanrame dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Di Dusun Ketapanrame terdapat Taman Ganjaran dan Air Terjun Dlundung, sementara Dusun Sukarame memiliki objek wisata Sumber Gempong.



Gambar 1.1 Taman Ganjaran
Sumber : Rumah123

Desa Ketapanrame memiliki salah satu daya tarik wisata unggulan berupa Taman Ghanjaran, sebuah kawasan strategis yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti sentra kuliner, taman terbuka, kolam renang, dan tempat penjualan cendera mata. Pembangunan Taman Ghanjaran dibiayai

oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan dana sebesar 5 M dan dibangun di atas Tanah Kas Desa (TKD). Pada tahap pengembangan berikutnya, masyarakat Dusun Ketapanrame berperan aktif dengan menyumbangkan kontribusi kolektif senilai 3,8 juta rupiah dari seluruh 404 kepala keluarga. Pemerintah desa memberikan prioritas kepada warga Desa Ketapanrame untuk mengelola stan kuliner di Taman Ghanjaran sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.



Gambar 1.2 Wisata Sumber Gempong
Sumber : detik travel

Pemerintah desa melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat dengan menambahkan objek wisata baru. Pada tahun 2021, Desa Ketapanrame mengembangkan kawasan wisata Sumber Gempong menggunakan dana dari keuntungan usaha Bumdesa tahun sebelumnya. Meskipun lahan sawah milik warga di sekitar kawasan tersebut tetap difungsikan untuk pertanian, lahan tersebut juga dimanfaatkan sebagai area eksplorasi wisata sawah sekaligus spot fotografi, tetap mempertahankan kondisi alamnya. Pemilik lahan memperoleh

imbalan sebagai bagian dari kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata ini. Selain itu, penduduk yang tidak memiliki lahan sawah tetap dapat berpartisipasi dengan membuka warung makanan, gerai oleh-oleh, atau menjalankan usaha lain di kawasan wisata tersebut, serta berkesempatan untuk berinvestasi dalam pengembangan wahana permainan.

Sumber Gempong kini telah menjadi ikon wisata di Desa Ketapanrame dan menjadi destinasi favorit bagi wisatawan baik dari luar maupun dalam kota. Selain itu, desa ini juga menawarkan daya tarik wisata alam lain, yakni Air Terjun Dlundung yang berada di wilayah Perhutani. Pengurusan dan pemeliharaan Air Terjun Dlundung ditangani oleh Perum Perhutani Kabupaten Mojokerto, sementara pengelolaan area parkir ditangani oleh BUMDES Mutiara Welirang. Di kawasan sekitar Air Terjun Dlundung, hadir Taman Kelinci yang dikembangkan bersama komunitas lokal dan berada di bawah pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang. Desa Ketapanrame juga menawarkan wisata budaya, seperti pertunjukan Bedoyo Putri Mojosakti dan Mayang Rontek, yang biasanya digelar untuk menyambut kedatangan wisatawan di amfiteater Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong. Para penarinya merupakan hasil binaan dari sanggar tari lokal. Selain itu, kesenian tradisional seperti ganongan, bantengan, barong, pencak silat, dan tari jarahan juga ditampilkan pada event-event-event tertentu. Tidak hanya itu, terdapat wisata edukasi yang ada di Desa Wisata Ketapanrame yang meliputi edukasi pertanian, pembuatan produk local (samiler dan jamu), budidaya maggots, wisata petik, edukasi alat musik gamelan.



Gambar 2.1 Grafik Jumlah Pengunjung Sumber Gempong dan Taman Ganjaran Tahun 2019-2023

Sumber : BUMDes Mutiara Welirang

Gambar diatas menunjukkan tren peningkatan jumlah pengunjung di Sumber Gempong dan Taman Ganjaran dari tahun 2019 hingga 2023. Setelah penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, kedua destinasi mulai mengalami lonjakan signifikan sejak 2021, dengan puncaknya pada 2023. Berkat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, Desa Wisata Ketapanrame berhasil meraih berbagai prestasi yang dilansir bumdesamutiarawelirang.com (2023) berikut :

“Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Desa Ketapanrame telah memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi di bidang pariwisata. Beberapa di antaranya meliputi: Juara 1 Desa Wisata yang Meraih Penghargaan Tertinggi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023; Juara 1 Desa Sejahtera Astra Tahun 2020; Juara 2 Desa Brilian oleh BRI Tahun 2021; penghargaan Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera dari Disbudpar Jatim Tahun 2022; penghargaan Wisata Alam Terbaik untuk kategori pengelolaan kelompok masyarakat dalam East Java Tourism Award 2023; serta Juara 1 Desa Wisata Nusantara Kategori Maju Mandiri Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT”

Sumber: (<https://www.bumdesamutiarawelirang.com/2022/12/intip-penghargaan-yang-dianugerahkan-kepada-bumdes-ketapanrame.html?m=1>) diakses pada 11 Maret 2025)

Keberhasilan desa wisata Ketapanrame tidak lepas dari kontribusi pemerintah desa, pegawai BUMDes, serta dukungan dan partisipasi aktif

masyarakat sekitar. Peran masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan destinasi wisata, karena mereka adalah pihak yang paling memahami potensi wisata di daerahnya, yang dikenal sebagai masyarakat yang sadar pariwisata.

Implementasi *Community Based Tourism* memerlukan dasar yang kokoh dan sasaran yang terdefinisi dengan jelas, yang diwujudkan melalui perencanaan yang sistematis. Guna mewujudkan tujuan ini, masyarakat diharapkan membentuk kelompok sadar wisata dan alam sekitar yang bertindak sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan pariwisata di daerahnya (Syafiqah et al., 2022).

Tabel 2.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Tahun 2024

No.	Jenis Mitra/Usaha	Jumlah
1.	Mitra Kelompok Investasi	533 rumah tangga
2.	Mitra Kelompok Stand Makanan	184 rumah tangga
3.	Mitra Kelompok Kios & Kandang Ternak	120 rumah tangga
4.	Mitra Kelompok Petani Kopi	70 rumah tangga
5.	Mitra Kelompok Parkir Karang Taruna	85 orang
6.	Mitra Homestay	11 rumah tangga
7.	Mitra Pokdarwis	38 orang
8.	Mitra Kelompok Sawah	30 rumah tangga
9.	Mitra Kelompok UMKM	10 kelompok

Sumber : Data Desa Ketapanrame

Capaian Desa Ketapanrame hingga 2024 menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat, yaitu 1.251 KK atau 63,30 persen dari 1.976 KK dalam berbagai unit usaha. Kelompok investasi menjadi yang terbesar dengan 533 rumah tangga dan total nominal Rp 4.596.000.000. Sektor wisata turut berkembang melalui 184 rumah tangga pengelola stand wisata dan 11 rumah tangga pengelola homestay. Pada sektor ekonomi produktif lainnya, terdapat 120 rumah tangga yang tergabung dalam kios dan kandang ternak, 70 rumah tangga petani kopi,

serta 30 rumah tangga kelompok sawah. Pemuda desa juga berperan melalui kelompok parkir yang melibatkan 85 orang, sementara pengelolaan wisata didukung 38 anggota Pokdarwis dan 10 kelompok UMKM. Secara keseluruhan, seluruh unit usaha mampu menyerap 178 tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Desa Ketapanrame, pelaksanaan konsep pariwisata berbasis masyarakat melibatkan dua kelompok utama di kalangan warga. Yang pertama adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Taman Ghanjaran, yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai wahana rekreasi di kawasan Taman Ghanjaran. Kelompok kedua adalah Pokdarwis Rakasiwi, singkatan dari Penggerak Destinasi Wisata Desa, yang berfungsi mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata di area persawahan Sumber Gempong. KUB Taman Ghanjaran menjadi mitra strategis BUMDes dengan tugas mengelola aspek manajerial dan operasional taman wisata tersebut. Organisasi ini terdiri dari 432 anggota yang berasal dari tiga dusun berbeda dan bertugas mengelola dana investasi yang dihimpun dari warga desa yang menjadi pemegang saham dalam proyek wisata tersebut. Melalui skema investasi ini, warga yang memiliki saham secara otomatis menjadi bagian dari KUB dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi, termasuk dalam mekanisme penunjukan atau pemilihan pengurusnya. Proses pemilihan dilakukan secara musyawarah dengan persetujuan terbuka dari para anggota. Pengurus terpilih nantinya akan bertanggung jawab mengelola seluruh

kegiatan pariwisata, termasuk penataan dan pemanfaatan dana investasi dari masyarakat.

Pokdarwis Rakasiwi turut menjalankan peran dalam pengembangan wisata desa di samping KUB Taman Ghanjaran sebagai kelompok masyarakat yang mendukung sektor pariwisata lokal. Meskipun demikian, keterlibatan Pokdarwis Rakasiwi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Wisata Sawah Sumber Gempong tidak sebesar KUB. Hal ini dikarenakan tanggung jawab utama dalam aspek manajerial dan pengembangan fasilitas wisata berada di tangan BUMDes. Keterbatasan kewenangan ini muncul karena Pokdarwis Rakasiwi masih berstatus sebagai mitra pendamping BUMDes yang baru didirikan, sehingga membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan lebih lanjut. Kelompok tersebut beranggotakan 50 orang dan berfokus pada kegiatan operasional, seperti pengelolaan petugas parkir dan layanan tiket. Selain itu, Pokdarwis Rakasiwi juga dilibatkan dalam pemilihan ide-ide kreatif serta pengelolaan media promosi, walaupun dalam praktiknya kontribusi ini masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Desa Ketapanrame masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan desa wisata meskipun telah meraih berbagai prestasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti saat pra-penelitian bersama Kepala Desa Ketapanrame, Bapak Zainul Arifin, ditemukan beberapa kendala dalam proses pengembangan desa wisata:

“Kalau kendala awal-awal itu mereka memang mindset-nya belum di situ, sehingga kita harus sosialisasi, sering komunikasi baik pertemuan rutin maupun tidak, kemudian kita sampaikan bahwa kita arahnya menjadi desa wisata.

Kemudian ketika perilaku desa wisata itu harus bersih dan indah, tidak hanya di destinasi wisata tapi di semua titik-titik kampung itu harus bersih dan indah, sehingga perilaku masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga kesan desa wisata itu sejuk, rapi. Itu perilaku yang harus kita tanamkan pada masyarakat. Itu juga awal-awal juga sulit sehingga mulai sekarang lebih membaik. Kemudian ketika perilaku desa wisata itu harus bersih dan indah, tidak hanya di destinasi wisata tapi di semua titik-titik kampung itu harus bersih dan indah, sehingga perilaku masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga kesan desa wisata itu sejuk, rapi. Itu perilaku yang harus kita tanamkan pada masyarakat. Itu juga awal-awal juga sulit sehingga mulai sekarang lebih membaik". (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2024 di Kantor Desa Ketapanrame).

Penjelasan wawancara diatas pada saat pra peneltian bahwa salah satu tantangan utama berada pada pola pikir masyarakat yang belum terbentuk sesuai dengan visi desa wisata. Selain itu, dengan kebijakan yang mewajibkan perekrutan karyawan hanya dari warga desa, sehingga kelompok pengelola wisata harus terus belajar mengenai manajemen pariwisata, karena sebagian besar masyarakat belum memiliki latar belakang pendidikan atau sertifikasi di bidang tersebut. Kemudian pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar mencerminkan karakteristik desa wisata, khususnya dalam hal kebersihan dan keindahan lingkungan. Tidak hanya pada lokasi destinasi wisata, namun seluruh wilayah desa harus mencerminkan suasana yang bersih, rapi, dan sejuk.

Kendala lain yang diungkapkan adalah kurangnya kemampuan sebagian masyarakat dalam menangkap peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Banyak warga merasa tidak memiliki peran karena tidak tinggal langsung di sekitar lokasi wisata atau tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan wisatawan. Dalam proses pengembangan Desa Ketapanrame sebagai desa wisata, dibutuhkan perubahan pola pikir, pembentukan perilaku baru yang mendukung lingkungan

pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi local. Selain itu ditemukan pula keluhan dari pengunjung terkait layanan parkir di Wisata Sawah Sumber Gempong. Masalah ini mencerminkan adanya kendala seperti terbatasnya lahan parkir dan pengelolaan parkir yang belum efektif, sehingga kerap menimbulkan antrean dan kemacetan. Kondisi tersebut disebabkan oleh akses jalan yang sempit, minimnya petugas parkir saat akhir pekan, serta kurangnya keterampilan beberapa petugas dalam memberikan layanan secara profesional.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Community Based Tourism* untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Konsep CBT ialah bentuk pembangunan yang relatif baru dan berfokus pada pendekatan partisipatif. Istilah *Community Based Tourism* mulai dikenal pada pertengahan 1990-an, biasanya dalam skala kecil, yang melibatkan interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal di wilayah pedesaan (Asker, et al., 2010). *Community Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat adalah konsep yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pariwisata (Anggraeni & Rahmawati, 2021). CBT dilaksanakan dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara lingkungan, masyarakat, dan nilai-nilai budaya. Konsep ini tidak sekadar menjadi alat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat, tetapi juga berperan dalam menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan (Suansri, 2003). Dengan demikian, CBT dipandang sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menggerakkan

perekonomian, tetapi juga melindungi kelestarian lingkungan serta mempertahankan warisan budaya masyarakat.

Community-Based Tourism (CBT) merupakan konsep yang bertujuan memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan melalui interaksi langsung dengan kehidupan masyarakat lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. CBT menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama dalam pembangunan sektor pariwisata, dengan penekanan pada aspek pengembangan, peningkatan mutu, serta pelayanan yang optimal (Nasrullah et al., 2021). Masyarakat diberikan hak dan kewenangan penuh terhadap proses pembangunan pariwisata di daerah mereka (Usman et al., 2022). Oleh sebab itu, peran masyarakat sangat penting, mulai dari sebagai investor, perencana, pelaksana, pengelola, pemantau, hingga evaluator dalam proses pembangunan pariwisata (Maharani et al., 2021). Berdasarkan pandangan Hausler dan Stradas, *Community Based Tourism* (CBT) merupakan suatu model pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam proses pengelolaan dan pembangunan destinasi wisata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sekaligus menjamin pemerataan serta keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata (Arum et al., 2022). Hausler mengajukan pendekatan ini sebagai bentuk kritik terhadap model pembangunan pariwisata yang sering kali menyingkirkan kepentingan serta keterlibatan penduduk setempat di kawasan destinasi wisata. (Arum et al., 2022).

Pariwisata Berbasis Komunitas dapat dipahami sebagai suatu paradigma pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi wisata. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan masyarakat, baik yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata. Tujuannya adalah mendorong kehidupan yang lebih demokratis dan memastikan manfaat dari pariwisata bisa dirasakan secara adil oleh seluruh warga setempat. Sasaran utama dari CBT adalah menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam merancang, mengelola, dan menentukan arah pengelolaan sektor pariwisata (Raharjo & Wirahayu, 2025). Sebagai pendekatan pembangunan, CBT juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi komunitas lokal, tetapi juga bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata.

Menurut (Suansri, 2003) terdapat lima aspek utama yang menjadi dasar dalam pengembangan *Community Based Tourism* (CBT), yaitu aspek lingkungan, politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Pariwisata berbasis masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata, sehingga membuka peluang untuk mendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan yang berakar dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Destinasi yang dikembangkan dengan konsep ini

memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek ekonomi, ekologi, politik, sosial, dan budaya (Nawangsari & Rahmatin, 2022). Tujuan dari model pariwisata ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian budaya, nilai-nilai lokal, dan tradisi yang dimiliki.

Adapun beberapa dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep *community based tourism* yang dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Sanna Nadia Suhaimi, Titania Athaya Putri, Agustian Harahap, dan Alhilal Furqan (2024) menyatakan bahwa implementasi *Community-Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Mekarsari masih berada pada tahap pengembangan awal. Desa tersebut memiliki potensi yang signifikan berkat kekayaan alam serta komoditas unggulan seperti susu sapi, kopi, dan teh. Namun demikian, proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kolaborasi antara pengelola destinasi wisata dengan para pemangku kepentingan. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Firman Prayoga dan Hadi Wahyono (2024), ditemukan bahwa sebagian besar kriteria *Community-Based Tourism* (CBT) belum dapat dipenuhi secara optimal di Wisata Puncak Pagerbatur. Salah satu faktor penyebabnya adalah tahap operasionalisasi yang masih belum sepenuhnya matang. Dengan demikian, pengembangan destinasi ini memerlukan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan guna memperkuat implementasi CBT di Kota Banjar. Kemudian penelitian ketiga menurut Fafurida, Ahmad Daerobi, Guntur Riyanto (2022). Hasil Penelitian ini menemukan

sebuah model Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-Based Tourism/CBT*) yang telah diterapkan dalam pengembangan wisata pedesaan di Dieng Kulon. Pengembangan ini dilakukan melalui pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Pokja (Kelompok Kerja) di delapan bidang.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung terfokus pada aspek tertentu seperti pembentukan kelembagaan, tahapan pengembangan, atau evaluasi standar. Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teori *Community Based Tourism* (CBT) menurut Potjana Suansri. Pemilihan teori *Community Based Tourism* (CBT) menurut Suansri dalam penelitian ini didasarkan pada kelengkapan dimensi yang ditawarkan oleh pendekatan tersebut dibandingkan dengan teori-teori pada penelitian terdahulu lainnya. Suansri tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga secara komprehensif mencakup dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan politik, yang sangat relevan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Rakasiwi dan permasalahan lain pada Desa Ketapanrame. Selain itu penelitian ini memiliki keunggulan karena mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan CBT di Desa Ketapanrame dengan melibatkan dua kelompok utama masyarakat KUB dan Pokdarwis serta mengaitkan antara praktik lapangan dengan dimensi teori Suansri (2003) yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai implementasi CBT di desa wisata yang sudah berkembang namun masih menghadapi berbagai tantangan operasional dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pembangunan pariwisata di Desa Ketapanrame telah mencerminkan

prinsip-prinsip keberlanjutan dan memberdayakan masyarakat secara adil dan menyeluruh dengan menggunakan teori Suansri sebagai kerangka analisis. Studi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan yang bersifat aplikatif bagi pengelola desa wisata, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilaksanakan sebagai langkah dalam mendukung terciptanya desa wisata yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan *Community Based Tourism* dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan *Community-Based Tourism* dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto, dengan fokus pada analisis praktik dan strategi yang dijalankan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang tidak hanya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik nyata di lapangan. Secara umum, manfaat penelitian ini memiliki dua dimensi manfaat utama, yaitu manfaat dari segi teori dan manfaat dari segi praktik.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari sisi akademis, studi ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan dalam ranah Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait dengan pendekatan *community based tourism* dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Temuan-temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi masukan yang berharga dalam menguji, mengembangkan, atau bahkan membangun teori-teori baru yang relevan. Selain itu, temuan dari studi ini juga direncanakan menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti antara lain adalah memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan desa wisata, memahami tantangan dan peluang pariwisata berbasis komunitas, serta melatih keterampilan komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Karya ilmiah ini dapat memperkaya literatur akademik yang tersedia di lingkungan universitas, terutama di lingkup Program Studi Administrasi Publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong budaya riset dan pengembangan keilmuan di kalangan sivitas akademika.

3. Bagi Desa Ketapanrame

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata kepada pihak desa, berupa masukan strategis, rekomendasi kebijakan, serta perspektif baru yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengelola potensi desa wisata. Harapannya, hasil penelitian ini mampu mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Ketapanrame secara berkelanjutan.